

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdullah Gofar, *Teori Dan Praktik Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Tunggal Mandiri, Malang 2014.
- Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002.
- Ahmad Kamil dan M. Fauzan, *Kaidah-Kaidah Hukum Yurisprudensi*, Kencana, Jakarta, 2008.
- Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga dan Hukum Pembuktian*, Bina Aksara, Jakarta, 1986
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2003.
- Amir Syarifuddin, *Adat Minangkabau Pola dan Tujuan Hidup Orang Minang*, Mutiara Sumber Widya, Jakarta, 1994.
- Antonius Sudirman, *Hati Nurani Hakim dan Putusannya Suatu Pendekatan dari Perspektif Ilmu Hukum Perilaku (Behavioral Jurisprudence) Kasus Hakim Bismar Siregar*, Citra Aditya Bakti, Bandung 2007, hlm.196-197
- A.A Navis, *Alam Berkembang Jadi Guru, Adat dan Kebudayaan Minangkabau*, PT. Grafindo Pers, Jakarta. 1984
- A.Siti Soetami, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Refika Aditama, Bandung, 2005.
- Badriyah Khaleed, *Mekanisme Pengadilan Tata Usaha Negara*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2016.
- Bewa Ragawino, *Hukum Administrasi Negara*, (FISIP Universitas Padjajaran, 2006.
- Chairul Anwar, *Hukum Adat Indonesia Meninjau Adat Minangkabau*, PT. Rhineka Cipta, Jakarta, 1997.
- Dewi Wulandari, *hukum adat Indonesia suatu pengantar*, Cetak ke -4, PT. Refika Aditama, Bandung, 2016.

- Datuk Sangguno di Rajo, *Curai Paparan Adat Alam Minangkabau*, Depdikbud, Jakarta, 1984.
- Datoek Toeh Payakumbuh, *Tambo Alam Minangkabau*, cetakkan ke tiga belas, CV. Pustaka Indonesia, Bukittinggi, tanpa tahun terbit.
- Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010.
- Edison dan Nasrun, *Tambo Minangkabau*, cetakan pertama, Kristal Multimedia, Bukittinggi, 2010.
- Helmy Panuh, *Peranan Kerapatan Adat Nagari Dalam Proses Pendaftaran Tanah Adat di Sumatera Barat*, cetakan ke-1, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012.
- Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Mondar Maju, Bandung, 1992.
- Idrus Hakimy, *Pegangan penghulubundok anduang, dan pidato aluapasambahan adat di Minangkabau*, Remaja Karya, Bandung, 1984.
- I Gede Yusa, dkk., *Hukum Tata Negara Pasca Perubahan UUD 1945*, Setara Press, Malang Jatim, 2016
- I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Prenada Media Grup, Jakarta, 2017.
- Indroharto, *Usaha Memahami Undang-undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1993.
- Iskandar Kemal, "Pemerintahan Nagari di Minangkabau & Perkembangannya Tinjauan Tentang Kerapatan Adat", edisi kedua, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2009.
- Jan Micheil Otto, *Kepastian Hukum di Negara Berkembang, terjemahan Tristom Moelino, Komisi hukum Nasional*, Jakarta, 2003.
- Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, PT. Bhuan Ilmu Populer, Kelompok Gramedia, Jakarta, 2007.
- Lintong O. Siahaan, *Prospek PTUN sebagai Pranata Penyelesaian Sengketa Administrasi di Indonesia, Studi Tentang Keberadaan PTUN Selama Satu Dasawarsa 1991-1981*, Perum Percetakan Negara RI, Jakarta 2005.

- Loebby Luqman, *Delik-delik Politik*, Ind-Hill CO, Jakarta, 1990.
- Lopa dan A. Hamzah, *Mengenal Pradilan Tata Usaha Negara*, Penerbit, Sinar Grafika, Jakarta, 1992
- Manggis M. Rasjid dan Datuk Radjo Penghoeloe, *Minangkabau: Sejarah Ringkas dan Adatnya*, Sri Darma, Padang, 1971.
- Mardalis, *Metode Pendekatan Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta, Bumi Aksara, 2010.
- Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1998.
- Mochtar Kusumaatmaja, *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*, Alumni, Bandung: 2002.
- Moh. Mahfud. MD, *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.
- Moh.Saleh Djindang, *Pengantar Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Cetakan ke-IX, Ichtiar Baru, Jakarta, 1990.
- Muchsan, *Sistem Pengawasan Terhadap Perbutan Pemerintah dan PeradilanTata Usaha Negara*, Liberty, Jakarta, 2007.
- Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Cet. 2, Alumni, Semarang , 1992.
- Munir Fuady, *Teori-Teori Besar Dalam Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Musyair Zainuddin, *Membangkit Batang Tarandam: Adat Salingka Nagari Di Minangkabau*, Ombak, Yogyakarta, 2011.
- Muchsan, *Sistem Pengawasan Terhadap Perbutan Pemerintah dan PeradilanTata Usaha Negara*, Liberty, Jakarta 2007.
- M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung.
- M.Syamsudin, *Kontruksi Baru Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progresif*, Edisi Kedua, Kencana, Jakarta, 2015.
- M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan dan Putusan Pengadilan*, cetakan kesepuluh, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.

- Oemar Seno Adji, *Peradilan Bebas Negara Hukum*, Penerbit Erlangga, Jakarta, 1980.
- Paulus Effendi Lotulung, *Peranan Yurisprudensi Sebagai Sumber Hukum*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, 1997.
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, KencanaKencana Prenada Media, Jakarta, 2008,
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media, Jakarta , 2008.
- Philipus M. Hadjon, *Tentang Wewenang, Makalah*, Universitas Airlangga, Surabaya. 2001.
- Pred N. Kerlinger, *Asas-asas Penelitian Behavioral*, Edisi Indonesia, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, cetakan kelima, 1996.
- Puslitbang Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil MA RI, *Kedudukan dan Relevansi Yurisprudensi Untuk Mengurangi Disparitas Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Penerbit Balitbang Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan MA RI, 2010.
- Razali Abdullah, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Edisi I, Cetakan 2, Rajawali Pers, Jakarta, 1992.
- Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, PT Radja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994.
- Rusadi Kantaprawira, *Hukum dan Kekuasaan*, Makalah, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 1998
- Rozali Abdullah, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, cetakkan ketiga, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1994.
- Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung, tanpa tahun.
- Sjachran Basah, *Hukum Acara Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Administrasi (HAPLA)*, cetakan pertama, Rajawali Press, Jakarta: 1989;

- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UII Pres, Jakarta, 1986;
- Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Press, Jakarta, 2000
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Radja Grafindo Persada, Jakarta, 2003
- Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta 2010.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty Yogyakarta, 2003.
- Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, CV. Alfabeta, Bandung, 2012.
- St. Munadjat Danusaputro, *Le Conseil d'Etat Dalam Tinjauan Peradilan Administrasi Negara RI*, Ceramah pada Simposium Peradilan Tata Usaha Negara yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional pada tanggal 5-7 Februari 1976 di Jakarta, dalam Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Simposium Peradilan Tata Usaha Negara, Cetakan Pertama, Bandung: Binacipta, 1977.
- Tatang Amirin, *Pokok-Pokok Teori Sistem*, Rajawali Press, Jakarta, 1996.
- Terence Ingman, *The English Legal Proces*, Blackstone, London, 1996.
- Tri Widodo Utomo, *Etika dan Hukum Adminidtrasi Publik*, LAN Perwakilan Jawa Barat, 2000.
- Yuliandri, *Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang Baik Gagasan Pembentukan Undang-Undang Berkelanjutan*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.
- Yuslim, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Cetakan ke-2, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
- Zainuddin Ali, *metode penelitian hukum*, Sinar grafika, Jakarta, 2009.
- Zairin Harahap, *Hukum Acara Peradilan tata Usaha Negara*, edisi revisi, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta 2008.

B. Undang-undang & Peraturan.

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa;
4. Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
5. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
6. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari;
7. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.
8. Perda Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 1983 Tentang Nagari sebagai kesatuan masyarakat hukum adat dalam Provinsi daerah tingkat I Sumatera Barat.

C. Putusan.

1. Pengadilan Tata Usaha Negara Padang No. 12/G/1995/PTUN-PDG;
2. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan No. 12/BDG-G/PD/PT.TUN-MDN/1996;
3. Mahkamah Agung dengan Register Perkara No. 327 K/TUN/1996;
4. Pengadilan Tata Usaha Negara Padang No.3/G/2017/PTUN.PDG, tanggal 26 September 2017;

D. Internet/Website

Website; <https://new.internet-start.net/>(terakhir kali dikunjungi tanggal 22 Februari 2020 jam 23.00) .

Website; [http://www.academia.edu/3723907/Kedudukan Peradilan Adat dalam Sistem hukum Nasiona.id.Pdf](http://www.academia.edu/3723907/Kedudukan_Peradilan_Adat_dalam_Sistem_hukum_Nasiona.id.Pdf), (terakhir kali dikunjungi 21 Agustus 2020 Jam 21.00).

E. Disertasi.

Kurnia Warman “*Pengaturan sumberdaya agraria pada era desentralisasi pemerintahan Di Sumatera Barat*”, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2009.

